

**PERUBAHAN DAN KONTINUITAS: PERAN PEMIMPIN LOKAL DALAM  
PENGUASAAN SUMBERDAYA AIR KOLEKTIF PADA MASYARAKAT  
MAUKARO, ENDE,  
NUSA TENGGARA BARAT  
Oleh: Mohammad Jibriel Avessina**

*Penelitian mengenai kepemimpinan politik dan struktur sosial dalam penguasaan atas akses sumber ekonomi kolektif diperlukan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat daerah. Pada periode November 2014, tim peneliti Central for Water governance (CWG) UIKA melakukan kegiatan turun-lapangan dalam rangka mendapatkan kajian mengenai peran informasi data lapangan (data tidak tertulis) untuk menjawab peran regulasi dalam kerangka menjamin keberlangsungan infrastruktur berbasis komunitas. pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disusun dalam Paduan TOR turun lapangan NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam-terstruktur, observasi partisipan dan wawancara kelompok terstruktur (FGD lokal).*

*Dalam konteks ini, tim CRPG telah melakukan wawancara mendalam terhadap informan pelaku regional pada tingkat Provinsi dan Kabupaten pada kegiatan pengelolaan kolektif atas sumberdaya air minum penyehatan lingkungan-berbasis masyarakat (AMPL-BM). Dalam konteks ini tim peneliti melakukan wawancara terhadap seluruh representasi stakeholder/pemangku kebijakan yang terdiri dari dua puluh tujuh informan sebagai pelaku regional AMPL-BM yang diseleksi dari beragam latar belakang yakni pegiat LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama maupun pelaku dari sektor pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai dinamika atas pelaksanaan regulasi dan keberlanjutan kegiatan AMPL\_BM di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur*

Peran kepemimpinan lokal amat penting dalam tiga aspek sosial pada pertama adalah aspek kepemilikan kultural atas pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kepemimpinan lokal sebagai agen perubahan kultural dengan peranya sebagai agen-agen sosialisasi terhadap program-program layanan masyarakat, pemimpin sosial secara kolektif memiliki pengaruh untuk mengubah perilaku masyarakat, karena tindakan serta kehendaknya dianggap sebagai representasi otoritas keputusan sosial-ekonomi dan kultural yang bernuansa sakral serta dianggap masyarakat bersifat mutlak. Ketiga pemimpin lokal memiliki peran sebagai pemegang otoritas sanksi sosial di dalam masyarakat, beberapa aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat seperti misalnya aktivitas berladang, penebangan hutan atau pemanfaatan sumberdaya alam tunduk pada otoritas sosial yang dimiliki oleh kepemimpinan lokal.

Dalam penelitian lapangan ini pendalaman ini selain pengambilan data tertulis berupa, akta pendirian, laporan kegiatan LSM, laporan kegiatan lembaga donor, Laporan kegiatan pemerintah, peraturan lokal maupun mekanisme tertulis lokal dalam keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah desa, juga dilakukan wawancara, observasi partisipan terhadap informasi data lapangan (data tidak tertulis) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disusun dalam Paduan TOR turun lapangan NTT.

Dalam mendapatkan data lapangan, tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*In-depth Interview*) serta *observasi partisipan*. Data ini diperlukan bagi tim peneliti untuk mendapatkan data narasi yang mendalam dan

detail serta terlibat secara emosional untuk memahami praktik dari regulasi dan proses keberlanjutan kegiatan Air minum penyehatan lingkungan dalam setiap topik yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan ini. Fokus lokasi studi lapangan yakni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur berdasarkan empat kriteria utama yakni pertama Provinsi Nusa Tenggara adalah pelaku AMPL-BM terbaik dalam bidang kelembagaan dalam skala nasional hal ini misalnya secara kualitatif dapat dibuktikan dengan penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL-Awards) yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Oktober 2013.<sup>1</sup> Kedua, Kabupaten Ende, NTT merupakan salah satu kabupaten yang memiliki regulasi lokal (peraturan daerah/perda) terbaru kegiatan air-minum penyehatan lingkungan berbasis masyarakat yaitu Perda no 13 tahun 2014 sehingga praktik kegiatan AMPL-BM memiliki payung hukum yang jelas. Ketiga, Kabupaten Ende merupakan wilayah fokus bagi lembaga donor serta pegiat AMPL melakukan pembangunan infrastruktur pengelolaan AMPL-BM.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tim peneliti menemukan dua lokasi studi yakni kecamatan Maukaro dan kecamatan Pulau Ende sebagai lokasi yang tepat sebagai studi kasus lapangan untuk memahami peranan regulasi dan keberlanjutan program air minum penyehatan lingkungan.<sup>2</sup>

Kriteria pemilihan wilayah studi kasus kecamatan Maukaro dilaksanakan melalui lima kriteria khusus yakni pertama, kondisi keberlanjutan pasca- program AMPL\_BM masih berlangsung dalam wilayah tersebut. Kedua, Kompleksitas infrastruktur dalam wilayah subyek. Ketiga lama durasi waktu pemanfaatan infrastruktur, keempat pola kelembagaan, kelima tipologi aset serta kepemilikan infrastruktur. Berdasarkan kelima kriteria tersebut tim peneliti memutuskan mendalami wilayah kecamatan Maukaro dan Kecamatan Pulau Ende dalam konteks peranan regulasi dan keberlanjutan pelaksanaan program air bersih berasal dari masyarakat.

### **Mosalaki: Pemimpin lokal dalam transisi perubahan sosial**

Penguasaan sumberdaya air minum dan penyehatan lingkungan-berbasis masyarakat (AMPL-BM) di kecamatan Maukaro peran otoritas lokal yang disebut sebagai disebut sebagai *Mosa laki* bercorak dominan. Kategori sosial mosalaki adalah yakni suatu kelompok pemimpin lokal yang memiliki otoritas sosial dan kultural atas sumber daya alam. Otoritas kekuasaan mosalaki berasal dari tata nilai yang diturunkan mengenai asal usul leluhur (*source of origin*) yang mencakup sejarah migrasi leluhur, aliansi dan perang serta konflik kekuasaan pada masa lalu, pertempuran antara kelompok-kelompok klan yang diturunkan dari beragam generasi hingga hari ini, namun lebih lanjut berdasarkan temuan lapangan, sejarah migrasi maupun sejarah konflik dalam komunitas komunitas sosial memainkan peranan yang utama sebagai peletak utama sebagai dasar legitimasi kekuasaan para Mosalaki. Lebih lanjut para *Mosa laki* memiliki mandat sebagai garis keturunan langsung dari para nenek moyang dalam praktik praktik kekuasaan tradisional.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>1</sup>Lihat laporan bulanan Waspola Facility pada bulan September 2013, Dokumentasi No: 049/2013/AWP1/C4/MR09 (AusAID Initiative INI 390), hal 13-19 lihat juga [http://www.ampl.or.id/read\\_article/profil-kedua-belas-pemenang-penghargaan-ampl-award-2013/332](http://www.ampl.or.id/read_article/profil-kedua-belas-pemenang-penghargaan-ampl-award-2013/332)

<sup>2</sup>Lihat dalam kajian yang dilakukan oleh P.Nugroho *Masalah pemenuhan kebutuhan air bersih tiga desa di Kabupaten Ende*, JAI Vol.4, No1.2008 hal 22-27, lihat *Pulau Ende Kisah Sukses pulau pertama Indonesia yang terbebas dari buang air besar sembarangan*. Jakarta, Kementrian Kesehatan: 2012.

<sup>3</sup>Sebagai komparasi lihat studi yang dilaksanakan oleh Johannes Emmed Prioharyono *Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores* dalam Jurnal Antropologi

konteks ini temuan lapangan dari tim peneliti menunjukkan pola kerjasama, persaingan dan konflik dalam memperebutkan kekuasaan dalam masa lalu menjadi landasan terbentuknya struktur hirarki sosial pada masyarakat lio-Ende pada hari ini.

Struktur hirarki kultural dalam masyarakat Ende-Lio ini membentuk organisasi sosial yang kokoh, peran politik para *Mosa laki* begitu luas, keputusan-keputusan penting dalam arena sosial secara non formal selalu melibatkan para *Mosa laki*.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensinya meskipun terdapat struktur kelembagaan formal yang dianggap sebagai perpanjangan birokrasi pemerintah pada tingkatan local seperti Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa ataupun kepala dusun namun peran *Mosa-Laki* yang kompleks masih menjadi penentu secara non formal atas keputusan keputusan yang dibuat secara bersama oleh lembaga-lembaga formal beserta pranata *mosa-laki*. Berdasarkan temuan lapangan, relasi antara Mosa-laki dan masyarakat lokal biasanya menganut model *patron-klien*, hal ini secara jelas dapat dibuktikan dengan posisikelompok *mosa-laki* sebagai pemilik “sah” tanah adat secara kultural sedangkan posisi masyarakat adalah para penggarap atas tanah-tanah yang dimiliki oleh para *mosa laki*.<sup>5</sup>

Relasi kuasa antara *Mosa-Laki* dan masyarakat ditunjukkan dalam dua tindakan, pertama adalah penghormatan masyarakat atas petunjuk-petunjuk dari *mosa-laki* mengenai tata cara berladang, pelarangan atas penebangan hutan, ekspresi pola syukur terhadap hasil bumi yang kesemuanya dilaksanakan secara total oleh masyarakat, kedua tradisi “upeti” yang berupa persembahan masyarakat kepada para *mosa-laki* atas setiap hasil panen atau hasil bumi atas hasil kerja keras mereka sebagai petani. Secara umum penduduk di Kecamatan Maukaro berprofesi sebagai petani yang menanam komoditas pertanian dan perkebunan. Mereka menanam tanah-tanah yang secara kultural milik *Mosa-Laki* yang berbentuksawah dan ladang yang pada setiap musim ditanami padi, jagung, umbi-umbian. Perkebunan mereka ditanami dengan komoditas seperti kakao, jambu mete, pisang, kelapa dan umbi-umbian, atau pepaya, dalam kata lain mata pencaharian penduduk lokal adalah kombinasi antara sistem pertanian dan perkebunan yang polanya mengikuti kebutuhan pasar. Dalam lokus penelitian kami di desa Kibirangga, masyarakat menanam tanah milik para *mosa-laki* sawah dengan pola tanam tradisional dengan akses pengairan dari danau dan bendungan air. Rata-rata penduduk desa memiliki sawah 0,25 hingga 0,50 hektar yang menghasilkan sekitar 1,5 ton gabah. Dalam konteks ini tugas dalam melaksanakan pekerjaan berkebun dibagi melalui kategori gender yakni tugas-tugas dalam ruang publik adalah tugas pria sementara tugas wanita adalah menyiapkan keperluan domestic rumah tangga sebelum membantu para pria di kebun. Pola pembagian kerja berbasis gender semacam ini merupakan pola yang umum diterapkan pada masyarakat yang menganut budaya hirarki dalam pola organisasi sosialnya. Peran *Mosa-Laki* dalam model *patron-klien* secara mendalam membentuk pola Organisasi sosial yang hirarkhis dalam melakukan kegiatan politik, sistem mata pencaharian maupun pengelolaan kepentingan kolektif. Secara lebih mendalam Olaf

---

Indonesia Vol 33 no 3 September-Desember 2012 hal 180-208. Studi yang dilaksanakan oleh Johannes Emmed lebih mendalam melihat aspek *source of origin* atau asal usul sebagai mite atas pembentukan kategori sosial yang disebut sebagai Mosalaki.

<sup>4</sup>Lihat Catatan Observasi dan Wawancara atas Camat Maukaro pada tanggal 12 November 2014; Wawancara atas Yohanis Nislaka, mantan Camat Maukaro pada tanggal 15 November 2014; lihat juga Lihat Wawancara dengan Yoseph Kesu, Kepala Desa Nabe yang tergabung dalam BPSAP Koja Kumi dalam catatan lapangan pada tanggal 16 November 2014

<sup>5</sup> Lihat catatan observasi oleh John Petrus talan atas kondisi struktur sosial di desa Kabbirangga tengah, Kecamatan Maukaro pada tanggal 11 November 2014

Smedal mengemukakan kategori atas *Mosa-Laki* dapat dibedakan dalam tujuh peran penting yakni antara lain:

1. *mosa kaba laki wéa*

*Mosa laki* yang berperan untuk mengontrol hasil sumberdaya (pangan,emas,hewan)

2. *mosa tana laki watu* atau *mosa watu laki tana*

*Mosa laki* yang memiliki kewenangan dalam pemanfaatan tanah

3. *mosa nua laki bo'a*

*Mosa laki* mosalaki yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan desa/mosalaki kecil

4. *mosa wiwi laki lema*

*Mosa laki* yang berperan dalam menyampaikan pesan sosial,nilai dan tata kebajikan

5. *mosa toa laki wela*

*Mosa laki* yang berurusan dengan aspek religious/keagamaan

6. *mosa pedu laki rona* OR *mosa péu laki rona* OR *Mosa wiu laki pi'u* OR *mosa pedu laki pada*

*Mosa laki* yang berperan dalam menentukan serta meneruskan regulasi/nasihat/tradisi lisan

7. *mosa po laki péra*

*Mosa laki* yang harus memiliki kewenangan sebagai pemimpin politik serta mampu memerintah mosalaki mosalaki yang lainnya.<sup>6</sup> Ketujuh kategori tersebut adalah strata dan diferensiasi kerja dari masing masing *mosa laki* berdasarkan temuan lapangan atas penelitian dikemukakan oleh Olaf Smedal, menurut olaf smadal peran yang khusus diberikan secara berurutan sesuai tanggung jawab yang dibebankan pada masing-masing dari *mosa laki* tersebut yakni pengelolaan serta penyimpanan hasil sumberdaya alam, kepemilikan pemeliharaan tanah,pemeliharaan tanggung jawab desa,sosial, konteks spirituitas/agama, regulasi/nasihat dalam mewujudkan tradisi lisan serta politik. Ketujuh kategori dari mosalaki tersebut menggambarkan hubungan masyarakat dengan para mosalaki.<sup>7</sup>

Berdasarkan studi dari Olaf Smedal maka ketujuh kategori sosial Mosalaki tersebut memiliki kekuatan kultural yang berbeda satu sama lain. *Mosa Laki Wea* misalnya cakupan otoritasnya kuat mencakup lebih dari kecamatan, namun demikian otoritasnya hanya dibatasi sebagai *mosa-laki* yang berhak dalam pengaturan persembahan syukur hasil panen,ternak ataupun logam mulia yang dikumpulkan untuk kepentingan orang banyak. Dalam konteks lain *Mosa-laki tana* adalah *Mosa laki* yang memiliki kewenangan dalam pemanfaatan tanah memiliki otoritas untuk pengolahan tanah, waktu serta pengelolaan larangan penebangan hutan, *Mosa-laki* juga berperan sebagai pengawas terhadap masyarakat pendatang yang mengelola tanah untuk mendapatkan hasil sumber daya alam,

---

<sup>6</sup> Lihat Hierarchy, Precedence and Values: Scopes for social action in Ngadhaland, Central Flores 2009 On the Value of the Beast or the Limit of Money: Notes on the Meaning of Marriage Prestations among the Ngadha, Central Flores. In Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Oxford & New York: Berghahn Books.hal 267-297

<sup>7</sup>*Ibid* hal 267-297

*Mosa-Laki Tana* juga berperan penting dalam memberikan izin kultural bagi pemerintah, masyarakat pendatang yang hendak memanfaatkan tanah sebagai fasilitas publik, misalnya dalam bentuk jalan, infrastruktur kesejahteraan masyarakat yang berdiri di atas tanah tersebut maupun misalnya pertanian/perkebunan mandiri. Bentuk tipologi *Mosa-Laki* yang ketiga adalah *Mosa-laki boa* yang memiliki tugas sebagai pelindung serta patron dari masing-masing desa-desa yang terdapat di Kabupaten Ende, *Mosa-laki boa* memiliki peranan serta otoritas yang mirip dengan ruang lingkup kepala desa tradisional di wilayah pulau Jawa yakni sebagai teladan serta mengatur keamanan serta kemakmuran desa. Dalam konteks ini wilayah kekuasaan *Mosa-laki boa* hanya sebatas wilayah desa saja, sehingga setiap desa memiliki *mosa-laki boa* yang berbeda-beda. Menurut Olaf Smedal *mosa-laki Boa* atau disebut juga oleh masyarakat lokal sebagai *mosa-laki kecil* adalah kategori *mosa-laki* terkecil di masyarakat, meskipun kekuasaannya kecil serta pengaruhnya tidak begitu besar namun *mosa-laki boa* memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi nilai-nilai tradisional yang eksis pada sebuah desa.

Lebih lanjut, Tipologi keempat adalah *Mosa-Lakilema* yakni tipe *mosa-laki* yang bertugas untuk mengatur nilai-nilai sosial, serta tata nilai kebajikan yang dianut oleh masyarakat, ruang lingkungannya luas biasanya setara dengan wilayah kecamatan. Tipologi kelima *mosa toa laki wela* yakni *mosa-laki* yang memiliki tanggung jawab dalam upacara-upacara adat yang bernuansa spiritual/keagamaan misalnya adalah persembahan syukur panen, pergantian musim hujan hingga pantangan-pantangan adat. Tipologi keenam adalah *mosa-laki rana* yang merupakan penerus tradisi lisan, yakni mite, legenda maupun internalisasi nilai-nilai kepercayaan yang diwariskan dari turun-temurun secara lisan. Tipologi ketujuh adalah *mosa laki pera* atau disebut juga *mosa laki pu`u* yakni *mosa laki* besar atau *mosa laki* yang memiliki kewenangan politik untuk memerintah atau mengarahkan *mosa-laki- mosa-laki* lainnya. *Mosa-laki pera* adalah *mosa-laki* yang paling memiliki otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Bilamana dilihat dari garis asal-usul kekuasaan (*Source of origin*) maka dapat dipastikan bahwa *mosa-laki pera* adalah

Sosok yang dianggap secara geneologis sebagai keturunan utama terpilih nenek moyang. Berdasarkan temuan lapangan, peran kekuasaan para *mosa-laki* yang sakral dan dominan serta menyeluruh juga berpengaruh dalam proses keberlangsungan program air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM). Dalam masa pra-konstruksi Mosalaki berperan untuk menyediakan tanah yang di dalamnya terdapat sumber air untuk dikelola secara bersama oleh BPSAB lokal, *Mosa-laki* melepaskan kepemilikan sumberdaya air melalui meskipun demikian secara adat tanah tetap dimiliki oleh *Mosa-Laki* sebagai konsekuensinya meskipun kepemilikan atas air bersifat kolektif namun otoritas mosalaki yang sakral menjadikan *mosa-laki* memiliki hak-hak istimewa tersendiri atas air yang telah dikelola secara kolektif melalui BPSPAM. Kekuasaan *Mosa-Laki* yang dominan tersebut dapat kita temukan dari pernyataan informan Mosalaki yakni Benediktus Bera sebagai berikut:

*“Kalau secara adat, kami punya itu semua mosalaki harus ada. menyaksikan segala macam. Jadi sebelum luka tanah itu mereka yang punya mata air itu musti parang itu atau pacul itu musti kita pegang sama-sama dulu. Tiap mosalaki pegang. Kalau potong babi, parang itu juga musti putar. Tidak boleh, walaupun engkau punya mata air tetapi tidak boleh engkau sendiri. Harus sama-sama dengan kita ini. Sampai hari ini pun air disitu kami tidak bisa untuk mau goyang lagi karena sudah serahkan sepenuhnya kepada BPSAP. Berani dia mau ambil kembali, resiko tanggung jawab sendiri. Karena kita sudah sumpah dengan leluhur yang ada, tanah-tanah, kita tidak boleh ambil lagi. Kami disini kalau tanah itu, pemali sekali kalau kita mau ambil kembali. Tidak boleh memang. Berani*

*engkau ambil, bahaya kita. Tidak boleh memang. Kalau sidang atau rapat BPSAP itu mereka undang kami di bawah itu, undang mosalaki.*”<sup>8</sup>

Patronase *mosa-laki* memiliki pengaruh kuat dalam hak pemanfaatan atas sumber daya air yang diberikan secara kolektif bagi kepentingan masyarakat banyak/kepentingan orang banyak. Maka pola relasi yang tidak setara antara *mosa-laki* dan masyarakat menyebabkan secara non-formal pola pengambilan keputusan yang berdampak atas keberlangsungan BSPAB tetap berada dalam pengaruh *Mosa-Laki*. Pola Patronase-klien atas *Mosa-Laki*-masyarakat tersebut selaras dengan temuan dari Hans Antlov atas karakteristik gotong-royong pada masyarakat pedesaan adalah refleksi dari sistem pola organisasi sosial yang bersifat hirarkis, namun demikian peran yang dimiliki oleh *Mosa-Laki* lebih kompleks karena status sosial patron tidak melekan dengan pola birokrasi formal yang terdapat di Kecamatan Maukaro.

Peran *Mosa-Laki* tentu saja berbeda dengan pola *patron-klien* yang terdapat di pedesaan wilayah Jawa yang menjadi fokus perhatian dari Hans Antlov sehingga keberadaan “patron tunggal” seperti yang kerap kali disimbolkan sebagai figur sentral Kepala Desa yang memiliki fungsi kepemimpinan tunggal mutlak bersifat ganda yakni sebagai patron secara birokratis maupun patron secara sosial, tidak dapat ditemukan dalam konsep *mosa-laki*. Dalam konteks ini *Mosa-laki* bersifat jamak terdiri dari keluarga-keluarga berpengaruh yang memenangkan kontestasi kekuasaan pada masa yang lalu, peran *Mosa-laki* juga tidak pernah berpusat pada figur tertentu dalam sentral-sentral tokoh dari *mosa-laki* namun sakralitas atas *mosa-laki* justru berpusat pada posisi jabatan yang diemban oleh para *Mosa-laki* tersebut.<sup>9</sup> Dalam konteks ini keterlibatan peran *Mosa-laki* yang vital dalam pra-konstruksi pengadaan fasilitas air bersih untuk melakukan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat ternyata tidak ditindaklanjuti lebih lanjut pada saat program memulai fase pembentukan kelembagaan BPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Lembaga BPSPAM yang diharapkan menjadi sarana mandiri atas keberlanjutan program air minum penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM) yang dilaksanakan di masyarakat.

Dalam temuan lapangan di Kecamatan Maukaro pembentukan BPSAB terbagi menjadi tiga badan otonom yakni BPSAB Koja Kumi, BPSAB Koja Aje serta BPSAB Pae-Pu`u. Pada masa pasca-konstruksi setelah infrastruktur formal dan infrastruktur sosial selesai dibentuk oleh Lembaga Donor Pro Air, proses kelembagaan tidak berlanjut dengan baik, hal ini misalnya dapat dilihat dari keberlanjutan organisasi formal, penyelenggaraan rapat tahunan anggota maupun pelaksanaan iuran yang kurang berjalan dengan baik pada sebagian BPSPAM<sup>10</sup>. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan dalam kecamatan Maukaro yang telah dibangun tiga fasilitas air bersih yang bersifat multifungsi (yakni melayani akses air bersih lebih dari satu desa) yang dikelola melalui BPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), kita hanya menemukan satu BPSPAM Koja Aje yang memiliki kemampuan bertahan relatif lebih baik, hal ini ditandai dengan keberadaan iuran yang teratur serta pola kepemimpinan yang kuat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat Wawancara dengan Mosalaki Owa Oje, Benediktus Bera pada tanggal 12 November 2014

<sup>9</sup>Lihat Catatan Lapangan atas John Petrus Talan pada tanggal 12 November 2014

<sup>10</sup>Lihat dalam Wawancara dengan Vincensius Mei pada tanggal 16 November 2014,

Lihat juga catatan lapangan John Petrus Talan atas pemaparan ketua desa nabe yakni Yoseph Kesu pada tanggal 16 November 2014 .

<sup>11</sup>Lihat dalam Wawancara dengan Agustinus Meo pada tanggal 13 November 2014

Proses pembentukan kelembagaan BPSPAM yang hanya memandang keberadaan kategori sosial kelompok elit *mosa-laki* hanya sebagai satuan sosial yang sifatnya simbolik menyebabkan pembentukan kelembagaan BPSPAM sebagai organisasi pendukung fasilitas air minum yang berbeda dari bentuk pranata organisasi sosial yang telah eksis dikenal oleh masyarakat Kabupaten Ende. Sebagai konsekuensinya mekanisme sangsi sosial yang diberlakukan dalam konteks sosial ekonomi lainnya seperti berladang, tata cara memperlakukan hutan maupun perlakuan masyarakat terhadap hasil bumi yang menggunakan pendekatan pola budaya hierarkhis, komando dengan masyarakat terikat kuat dengan sangsi sosial, memiliki respon berbeda dengan perlakuan masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas air bersih yang mereka dapatkan melalui mekanisme tanggung jawab kolektif dengan media iuran berbayar serta sangsi sosial yang tidak mengikat secara kuat bagi masyarakat. Kedua pola organisasi sosial tersebut tentu saja sangat berbeda satu sama lain, implikasinya pola sangsi sosial yang akan diterapkan oleh BPSPAM tidak efektif di lapangan.

Hilangnya peran dominan *Mosa-laki* pada konteks sosial dalam pelaksanaan layanan air minum berbasis masyarakat (AMPL\_BM) secara mutlak berpengaruh atas mekanisme sangsi sosial yang muncul dalam pemanfaatan fasilitas akses air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pola masyarakat Maukaro yang terbiasa terikat dengan struktur sosial yang bersifat hirarkhis dengan pranata sangsi sosial yang kuat sebagai representasi otoritas *Mosa-Laki* yang memiliki kewenangan kultural dalam konteks aturan-aturan sosial seperti pemanfaatan hasil bumi, penguasaan tanah, politik maupun pengaturan desa-desa (*Mosalaki kecil-red*) beralih menjadi pengaturan yang bersifat kolektif dalam menjaga keberlangsungan fasilitas air minum bagi publik melalui rapat anggota, pembentukan BPSAB yang berbeda dengan pola struktur sosial masyarakat lokal serta penetapan sangsi sosial atas keputusan akses air minum yang dilakukan oleh pengurus BPSAB terhadap masyarakat yang berbeda pandangan mengikuti regulasi yang dibentuk untuk menjaga keberlangsungan akses air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. Hal ini misalnya seperti apa yang dikemukakan oleh Vincetius Mei sebagai berikut:

*"kalau dari bpsap bilang kalau begitu buka saja. nanti takutnya lari lagi ke pribadi, musuh pribadi lagi. Di bilang sudah kalau begitu mereka bayar tidak bayar, yang penting air jalan. Kalau di reservoir habis kasih mati. Tetapi saya tidak lakukan, saya masih punya pikiran bagaimanapun itu adalah tanggung jawab saya sebagai tenaga teknis, saya harus bekerja."*<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Informan Visensius Mei, seorang petugas teknis di BPSAB Koja Kumi maka sangsi sosial terhadap masyarakat pengguna air bersih yang tidak membayar uang iuran belum dapat diterapkan serta berjalan dengan baik, karena bilamana sangsi sosial diterapkan oleh pengurus BPSAB bersama petugas teknis misalnya dengan mematikan keran yang menjadi sumber akses air minum, potensi konflik pribadi yang dilakukan oleh individu orang per-orang dalam upaya keberlangsungan pemanfaatan fasilitas air bersih untuk kepentingan bersama. Namun demikian potensi konflik tersebut tidak muncul dalam pemanfaatan serta pengelolaan hasil sumber daya alam, pemanfaatan tanah, pemanfaatan hutan, politik lokal yang merupakan otoritas dari *Mosa-Laki* yang dianggap sakral bagi masyarakat setempat. Bagi masyarakat setempat seluruh keputusan sosial yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan kaum *Mosa-Laki*, maka dalam konteks ini *Mosa-Laki* berperan sebagai lambing dari keteraturan sosial bagi masyarakat di Kecamatan Maukaro.

---

<sup>12</sup>Lihat dalam Wawancara dengan Visentius Mei pada tanggal 16 November 2014

Dalam konteks lain peran mosa-laki tidak berlaku secara signifikan Kecamatan Pulau Ende, peran pemimpin lokal agama memiliki peran penting dalam pengorganisasian sosial, meskipun pemimpin agama tidak memiliki otoritas dalam bidang ekonomi maupun otoritas dalam bidang politik namun pemimpin agama memainkan otoritas penuh dalam bidang sosial-budaya.<sup>13</sup> Implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Pulau Ende selalu melalui persetujuan tokoh-tokoh agama setempat. Pemimpin agama (Kyai-red) dalam tingkatan lokal juga berperan penting dalam melakukan penetrasi terhadap masyarakat yang sensitif terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendatang, maka perilaku kolektif buang air besar sembarangan (BABS) di pantai yang sudah diturunkan sejak generasi-generasi terdahulu dapat berubah.

Pola perubahan perilaku ini dapat dilihat dari dukungan yang meningkat terhadap gerakan deklarasi mendukung Pulau ende bebas buang air besar sembarangan (BABS) yang merupakan bentuk aplikasi dari pola sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Proses internalisasi program dilaksanakan melalui pemimpin-pemimpin agama sebagai agen sosialisasi dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui pendekatan agama, misalnya dengan ajaran-ajaran agama, khotbah agama atas pentingnya kebersihan diri yang merupakan sebagian dari iman masyarakat berkenan untuk ikut serta secara total dalam program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).<sup>14</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Maukaro yakni pada kriteria pertama pembangunan infrastruktur air bersih telah dilaksanakan sejak tahun 2005 serta diselesaikan pada tahun 2008<sup>15</sup>. Proses persiapan pra konstruksi dilaksanakan dengan cermat, memperhatikan postur geografis maupun postur sosial keberagaman masyarakat, namun demikian pendekatan sosial terhadap masyarakat masih pada tahap penanaman simbolik, meskipun belum mengakar dalam melakukan penanaman nilai atas pentingnya usaha komunitas. Kondisi pasca-program AMPL-BM berlangsung di masyarakat dalam konteks ini kegiatan pengelolaan pemanfaatan fasilitas infrastruktur air masih terus berlangsung meskipun keberlanjutan pengelolaan air terancam terhambat pada masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Kedua, Pola pembangunan infrastruktur bersifat kompleks terdiri dari dua sistem yakni sistem tunggal dan sistem multisistem, tim peneliti memfokuskan pada sistem multisistem karena terdapat tiga (3) infrastruktur bersifat multisistem yakni infrastruktur air melayani akses air bersih untuk minimal 2 hingga 4 desa dengan sistem infrastruktur yang berkualitas baik yang telah dibangun oleh lembaga nirlaba Pro-Air.<sup>17</sup>

Ketiga, Proses tahapan pra konstruksi dilaksanakan dengan baik, persiapan dilakukan selama 5 tahun hingga infrastruktur air selesai dibangun pada tahun 2008. Sejak awal proses pembangunan infrastruktur air, pendekatan sosial simbolik kepada masyarakat dijalankan dengan baik, hal ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan awal infrastruktur air, pembentukan lembaga lembaga sosial dilaksanakan dengan cermat sehingga standar bentuk lembaga pengelola air berbasis komunitas pada tiga arena

---

<sup>13</sup>Lihat dalam Wawancara dengan Mad Salam pada tanggal 9 November 2014

<sup>14</sup> Lihat Wawancara dengan Petrus H Sudjata pada tanggal 10 November 2014

<sup>15</sup>Lihat Wawancara dengan Yoseph Kesu, Kepala Desa Nabe yang tergabung dalam BPSAP Koja Kumi dalam catatan lapangan pada tanggal 16 November 2014

<sup>16</sup>Lihat Wawancara dengan Vinsentius mei petugas teknis tergabung dalam BPSAP Koja Kumi pada tanggal 17 November 2014

<sup>17</sup>Lihat Wawancara dengan Vinsentius mei petugas teknis tergabung dalam BPSAP Koja Kumi pada tanggal 17 November 2014



program infrastruktur di Kecamatan Maukaro selaras dengan pola standar organisasi formal dengan

Keempat, pembangunan infrastruktur air bersih di Kecamatan Maukaro juga telah diimbangi dengan membentuk pola kelembagaan yang transparan yang bertugas untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat yakni BPSAB Koja Aje yang melayani empat desa dengan sentral infrastruktur pada desa kabirangga tengah, BPSAP Ae Pu`u yang melayani 3 desa yaitu desa kamubheka, desa natanangge dan desa mundinggasa, terakhir BPSAP Koja Umi yang melayani yang melayani desa Nabe dan Desa Kabaleba.<sup>18</sup>

Kelima proses kepemilikan aset dan infrastruktur secara kultural adalah kewenangan/otoritas Institusi adat. Dalam konteks ini pranata *Mosalaki* memiliki pengaruh penting bagi keberlangsungan program air minum penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM) karena aset tanah maupun akses terhadap air dipandang sebagai sesuatu yang relatif “sakral”. Dalam konteks ini proses akulturasi lembaga donor terhadap eksistensi pranata adat masih sebatas bersifat simbol atau seremonial sehingga dijadikan sebagai narasi pelengkap atau pembuka jalan terhadap proses pembangunan pra program dalam pembentukan aspek infrastruktur maupun aspek program sosial sehingga lembaga donor selayaknya mampu untuk menjamin keberlangsungan program secara sosial setelah lembaga donor meninggalkan lokus/lokasi program. Eksistensi pranata adat muncul serta berkembang dalam empat unsur yakni pertama, kepemilikan aset tanah sebagai dasar dari pembentukan infrastruktur, kedua sebagai prana yang berpengaruh dalam keputusan pada kepemilikan aset aset infrastruktur yang dimiliki secara kolektif, ketiga kemampuan untuk menentukan pola kepatuhan dan sanksi sosial dalam proses pemanfaatan infrastruktur air, mosalaki lebih didengar ketimbang pranata pranata modern yang dibentuk oleh lembaga-lembaga donor untuk menjamin keberlanjutan secara sosial program air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.

Pada temuan lapangan di Kecamatan Pulau Ende pelaksanaan kegiatan paska-konstruksi program Sanitasi Total berbasis masyarakat masih berlangsung meskipun pada masa yang akan datang berpotensi untuk menemui hambatan. Proses persiapan pra konstruksi, kampanye sosial masyarakat dilaksanakan dengan cermat, memperhatikan postur geografis maupun postur sosial keberagaman masyarakat, namun demikian pendekatan sosial terhadap masyarakat masih pada tahap penanaman simbolik, serta gagal melakukan penanaman nilai atas pentingnya usaha komunitas. Pembentukan karakter serta internalisasi nilai atas pentingnya pemanfaatan STBM sebagai fasilitas utama dalam kontur pola perilaku budaya sanitasi bermasyarakat.

Proses keberlanjutan paska konstruksi dalam fasilitas sanitasi total berbasis masyarakat dapat dilihat melalui mekanisme pemberian disinfektan yang baik serta deklarasi untuk mewujudkan pulau Ende sebagai pulau yang bebas dalam buang air besar sembarangan (BABS). Dalam konteks sosial pulau serta daratan memiliki perbedaan pola budaya, pada wilayah daratan kemajemukan sosial dikuasai oleh mosalaki atau pemilik wilayah sedangkan tokoh agama amat dominan dalam fasilitas sanitasi total berbasis masyarakat. Dalam konteks lain belum ada kepedulian dari pemerintah atas kegiatan pasca konstruksi. Kemajuan/kemunduran proses pasca konstruksi masih ditentukan oleh komitmen pribadi pemimpin birokrasi lokal atas persoalan air minum dan sanitasi. Kedua, Pola pembangunan infrastruktur bersifat kompleks yakni dengan infrastruktur pembangunan jamban bersifat massal yang berkualitas baik. Ketiga, proses tahapan pra

---

<sup>18</sup>Lihat Observasi lapangan oleh John Petrus Talan mengenai BSAP Ae Pu`u pada tanggal 13 November 2014

kontruksi dilaksanakan dengan baik diikuti oleh persiapan serta sosialisasi program STBM dilakukan selama 5 tahun hingga kampanye secara massal dapat dilakukan pada tahun 2011 yakni deklarasi pulau Ende bebas buang air besar (BABS).<sup>19</sup>

Keempat, proses pembangunan pembangunan infrastruktur STBM di pulau Ende juga telah diimbangi dengan membentuk pola kelembagaan yang transparan, hal ini terbukti dengan munculnya gerakan pulau Ende sebagai pulau pertama yang menerapkan STBM bertugas untuk memberikan akses sanitasi kepada masyarakat. Intervensi sosial pertama kali dilakukan oleh lembaga Unicef yang masuk karena tingginya tingkat penyakit di pulau Ende yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang menjadi penyebab utama masalah-masalah kesehatan, serta kesulitan akses air dalam pulau Ende, intervensi sosial pernah dilakukan oleh lembaga LSM atau pemerintah namun gagal untuk mendapatkan keberhasilan program, bentuk intervensi biasanya adalah pemberian bantuan semen lalu lepas tanpa mekanisme kontrol dan monitoring yang kuat.

Tim peneliti menemukan tiga temuan lapangan penting sebagai jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian yang terbagi dalam tiga fokus utama yakni sebagai berikut:

- Peranan kepemimpinan lokal yang mencakup atas kontrol atas kepemilikan aset lokal, Perubahan dan kontinuitas peran kepemimpinan lokal dalam melaksanakan sangsi sosial serta pola organisasi penyedia air minum berbasis masyarakat yang mendukung keberlangsungan infrastruktur program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
- Peran aktor-aktor masyarakat lokal, lembaga donor dan pemerintah dalam konteks pra-pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan kontruksi serta paska keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
- Ketiga, pola penentuan standar pelayanan tarif, operasionalisasi aset dan sanksi sosial melalui mekanisme penentuan dalam program pelayanan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

Tiga fokus utama tersebut merupakan temuan lapangan yang mencakup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan utama yang dikemukakan oleh tim peneliti. Berdasarkan wawancara dan observasi serta data data sekunder yang ditemukan oleh tim peneliti. Ketiga fokus utama tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang dikemukakan oleh tim peneliti pada saat melakukan kegiatan turun lapangan.

Data temuan lapangan ini diharapkan dapat diperbaiki dalam pembentukan pola regulasi sosial sehingga kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dapat dipenuhi sehingga tidak tercapai gagap-sosio-kultural terhadap perspektif pemerintah dan perspektif donor serta nilai nilai/pranata sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Petrus H Sudjata pada tanggal 10 November 2014

## Daftar Pustaka

### Buku

Prioharyono, Johannes Emmed *Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores* dalam Jurnal Antropologi Indonesia Vol 33 no 3 September-Desember 2012.

Antlov H, Sutoro Eko. *Village and Sub-District Functions in Decentralized Indonesia*. Paper to DSF's Closing Workshop, 12-13 March 2012.

Smadal, Olaf *Hierarchy, Precedence and Values: Scopes for social action in Ngadhaland, Central Flores 2009* On the Value of the Beast or the Limit of Money: Notes on the Meaning of Marriage Prestations among the Ngadha, Central Flores. In *Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations*. Oxford & New York: Berghahn Books

Nugroho, P *Masalah pemenuhan kebutuhan air bersih tiga desa di Kabupaten Ende*, JAI Vol.4, No1. 2008

Kualita, Qipra Galang: Isna Marifa, Laksmi Wardhani, Deasy Sekar T. Sari *Pulau Ende Kisah Sukses pulau pertama Indonesia yang terbebas dari buang air besar sembarangan*. Jakarta, Kementrian Kesehatan: 2012.

### Laporan

Laporan bulanan Waspola Facility pada bulan September 2013, Dokumentasi No: 049/2013/AWP1/C4/MR09 (AusAID Initiative INI 390), hal 13-19 lihat juga [http://www.ampl.or.id/read\\_article/profil-kedua-belas-pemenang-penghargaan-ampl-award-2013/332](http://www.ampl.or.id/read_article/profil-kedua-belas-pemenang-penghargaan-ampl-award-2013/332)

### Wawancara dan Observasi

Catatan Observasi dan Wawancara atas Camat Maukaro pada tanggal 12 November 2014.

Wawancara dengan Agustinus Meo pada tanggal 13 November 2014.

Observasi lapangan oleh John Petrus Talan mengenai BSAP Ae Pu`u pada tanggal 13 November 2014.

Catatan Lapangan atas John Petrus Talan pada tanggal 12 November 2014.

Catatan lapangan John Petrus Talan atas pemaparan ketua desa nabe yakni Yoseph Kesu pada tanggal 16 November 2014.

Wawancara dengan Mad Salam pada tanggal 9 November 2014.

Wawancara dengan Petrus H Sudjata pada tanggal 10 November 2014.

Wawancara dengan Mosalaki Owa Oje, Benediktus Bera pada tanggal 12 November 2014.

Wawancara dengan Vincensius Mei pada tanggal 16 November 2014.

Wawancara dengan Vinsentius mei p pada tanggal 17 November 2014.

Wawancara atas Yohanis Nislaka pada tanggal 15 november 2014.

Wawancara dengan Yoseph Kesu, Kepala Desa Nabe pada tanggal 16 November 2014.

Mohammad Jibriel Avessina Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi  
Universitas Ibn Khaldun

---